

Memaknai Pemilu Myanmar 2015

PEMILIHAN umum (pemilu) Myanmar 8 November 2015 kemarin, menarik untuk dicermati. Bukan saja karena pemilu ini sebagai pemilu pertama di era pemerintahan sipil. Melainkan juga sebagai momen penting untuk mengetahui seberapa jauh roda demokrasi sudah bergerak maju di-track yang benar di negeri berluas wilayah 678.033 km² dan kini berpenduduk sekitar 65 juta jiwa itu.

Ketika pemerintahan junta pimpinan U Thein Sein menggelar pemilu parlemen 7 November 2010, tidak sedikit pihak luar (asing) memandang sebelah mata. Lantaran Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) selaku partai oposisi utama pimpinan peraih Nobel Perdamaian 1991 Aung San Suu Kyi memboikot pelaksanaan pemilu. Boikot dilakukan akibat tidak adanya independensi maupun transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu serta banyaknya pelanggaran lain. Dengan demikian, Pemilu 2010 tidak memenuhi syarat untuk dimaknai sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai hakiki demokrasi.

Baru, setelah penyelenggaraan pemilu sela guna mengisi 48 kursi parlemen yang kosong akibat ditinggal legislatornya yang masuk lembaga eksekutif pada 1 April 2012, publik asing mulai memperhitungkan kesungguhan penguasa Myanmar mempraktikkan nilai-nilai hakiki demokrasi. Dalam pemilu sela tersebut Suu Kyi bersama NLD-nya menyapu 45 dari 48 kursi parlemen yang diperebutkan. Jumlah itu baru sekitar 10% dari total kursi parlemen. Namun, hal tersebut cukup untuk menciptakan kekuatan oposisi nyata di Parlemen Myanmar. Sehingga mewujudkan adanya *check and balance* dalam proses perumusan kebijakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

'Pengurangan Kecacatan'

Pemilu sela 2012 dengan segenap hasilnya cukup absah dan memadai untuk dimaknai sebagai 'pengurangan kecacatan' pesta demokrasi 7 November 2010. Kecacatan pemilu dan demokrasi Myanmar tentu akan semakin berkurang bilamana penyelenggaraan Pemilu 2015 minim

Chusnan Maghribi

kesalahan ataupun tindakan yang melanggar aturan main pemilu yang didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan pemilu Myanmar 2015 ini minim pelanggaran?

Mencermati sejak awal, agaknya masih terdapat cukup banyak pelanggaran dalam pemilu sekarang. Seperti misalnya mencuri start kampanye dan memasukkan data orang yang sudah meninggal di daftar pemilih serta tidak memasukkan warga dalam daftar pemilih lantaran ditengarai mendukung oposisi. Pelanggaran semacam itu lazim terjadi di negara-negara yang praktik demokrasinya masih dalam tahap pembelajaran dan belum matang.

Pelanggaran yang terjadi di Myanmar yang baru 'seumur jagung' mempraktikkan demokrasi tentu mudah dimaklumi. Tetapi, di luar itu terdapat *content* pelanggaran kampanye yang perlu disorot sekaligus dikritik tajam lantaran menyangkut perlakuan diskriminatif terhadap Agama Islam maupun etnis Rohingya khususnya. Ini terjadi ketika pemerintahan USDP menggalang dukungan biksu garis keras (Ma Ba Tha) pertengahan 2014. Saat menggalang dukungan itu pemerintahan USDP meminta Ma Ba Tha berkampanye secara nasional dengan menyatakan identitas Budha Myanmar tengah terancam oleh Islam, dan NLD adalah partainya orang-orang Islam. Barangkali kampanye Ma Ba Tha itulah yang membuat Suu Kyi bungkam terkait derita nestapa berkepanjangan etnis muslim Rohingya.

Jumlah Partai

Di luar pelanggaran itu, Pemilu Myanmar 2015 mencatat perkembangan positif berupa peningkatan jumlah partai poli-

tik yang bertarung memperebutkan suara pemilih serta orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg). Terdapat 91 partai dan 6.065 caleg yang ambil bagian dalam pemilu sekarang. Mereka memperebutkan sekitar 35 juta warga yang punya hak pilih.

Jumlah partai sebanyak itu tercatat hampir tiga kali lipat dari partai yang bertarung dalam pemilu 2010 yang berjumlah 37 partai. Beberapa di antaranya adalah USDP, NLD, Partai Persatuan Nasional (NUP), Angkatan Demokratik Nasional (NDF), Partai Demokratik Nasional Shan (SNDP), Union of Myanmar Federation of National Politics (UMFNP), Partai Rakyat Karen (KPP), Partai Pembangunan Bangsa Rakhine (RNDP), dan Generasi Muda 88. Dari partai sebanyak itu dipastikan hanya USDP dan NLD yang bakal bersaing untuk memenangkan pemilu sekaligus tampil sebagai partai nomor satu di Myanmar.

Terlepas siapa yang bakal menang, Pemilu 8 November 2015 dengan segenap dinamikanya, layak dimaknai sebagai momen pemantapan demokrasi Myanmar. □ - k.

*) Chusnan Maghribi,

Alumnus Hubungan Internasional FISIP UMY.